

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan isu penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kesehatan adalah keadaan di mana fisik, mental, dan kehidupan sosial berjalan sejahtera (Constitution of the World Health Organization n.d.). Selain itu, kesehatan terikat dengan interaksi kompleks antara faktor sosial dan ekonomi serta lingkungan fisik dan kebiasaan individu. Kesehatan secara global bermakna pemerataan kesehatan bagi semua orang di dunia dengan menekankan transnasional masalah kesehatan dan pencegahan penyakit. Pada saat ini, meningkatnya hubungan multisektoral maupun antaraktor telah menjadikan isu kesehatan sebagai fokus kerjasama internasional karena akan beriringan dengan peningkatan resiko penularan penyakit.

Dunia saat ini sedang dilanda fenomena penularan penyakit berskala global. Fenomena yang dikenal dengan pandemi Covid-19 ini terjadi pada awal tahun 2020 memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat dunia dan krisis kesehatan. Seluruh sektor kehidupan seakan lumpuh karena kebijakan pembatasan mobilitas yang ditetapkan negara. Sejak wabah SARS tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus menunjukkan peningkatan dengan adanya wabah H5N1 (flu burung), pandemi H1N1 (flu babi), MERS-Cov, Ebola, dan Zika. Fenomena tersebut menjadi peringatan masalah kesehatan global ditandai dengan munculnya berbagai efek sosial dan ekonomi yang meningkatkan kerentanan hidup manusia sehingga kesehatan menjadi subjek perhatian dunia agar akses hidup sehat dapat diterima oleh setiap golongan masyarakat (Taubenberger dan Morens 2006).

Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penerapan keilmuan kesehatan masyarakat merupakan

cara untuk mencapai kekuatan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, komunitas, dan populasi melalui promosi kesehatan gaya hidup sehat, penelitian penyakit, serta mendeteksi, mencegah, dan menangani penyakit menular. Tindakan ini merupakan usaha bersama antara para praktisi kesehatan dan pembuat kebijakan yang diterapkan melalui kelompok kecil di lapisan masyarakat seperti individu, keluarga, komunitas, hingga populasi di daerah tertentu (World Health Organization 2017).

Fenomena transnasionalisme membuat interaksi lintas batas negara meningkat. Minimnya keterlibatan dan kontrol negara, kegiatan ini sering dikaitkan dengan gerakan yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, dan politik untuk sebuah negara karena jaringan ada telah berkontribusi pada pembangunan masyarakat sipil global. Peran perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan gerakan sosial menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk membuat kebijakan. Transnasionalisme ekonomi yang mengglobal telah meningkatkan perdagangan dan perjalanan internasional yang semakin cepat akan meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular sehingga setiap negara harus mengambil langkah untuk melindungi warganya.

World Health Organization (WHO) sebagai badan kesehatan dunia menjadi ajang negara-negara untuk menjalankan kerjasama multilateral dalam menanggulangi pandemi dan ancaman transnasional. WHO juga bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam penyelesaian masalah kesehatan global, pembentukan agenda penelitian kesehatan, pengaturan norma dan standar, penerapan kebijakan berdasarkan bukti penelitian, serta monitoring dan evaluasi isu kesehatan yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan kesetaraan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, WHO bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan negara anggota yang mendukung objek pembangunan nasional menyangkut area prioritas kerja. Dalam mewujudkan agenda kesehatan global, Indonesia turut aktif di beberapa forum multilateral dan internasional, seperti *World Health Assembly* (WHA), *Global Health Security Agenda*

(GHSA), *Foreign Policy and Global Health* (FPGH), *ASEAN Health Ministers Meeting*, hingga Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Pada tahun 2010-2014, Indonesia berfokus untuk meningkatkan peran dan diplomasi di tingkat multilateral dengan strateginya melalui peningkatan partisipasi aktif dan inisiatif di berbagai forum, termasuk mengupayakan menjadi tuan rumah dalam berbagai pertemuan multilateral. Indonesia juga berupaya untuk mensinergikan partisipasinya di G-20 dan forum-forum lainnya dengan menekankan konsep akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*). Hal tersebut diterapkan pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui *Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (GRTKF), WHO untuk *virus sharing*, FAO, *Convention on Biodiversity*, dan WTO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019)

World Health Assembly (WHA) adalah forum perumusan kebijakan WHO yang dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara anggota WHO dan berlangsung setiap tahun di Jenewa, Swiss. Fungsi utama yang dimiliki adalah untuk menentukan kebijakan organisasi, menunjuk Direktur Jendral, mengawasi kebijakan keuangan, serta meninjau dan menyetujui anggaran pengusulan program. Delegasi negara membuat keputusan tentang tujuan dan strategi kesehatan agar dapat menjadi acuan pergerakan kesehatan global untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan (World Health Organization n.d.). Pada WHA ke-72, Indonesia berkontribusi dengan sukses menyelenggarakan pertemuan *Side Event* tentang buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Global Health Security Agenda (GHSA) menjadi jalan untuk menanggapi ancaman global terhadap penyakit menular yang semakin meningkat. Penyakit menular seperti SARS dan Ebola memiliki dampak yang menghancurkan terhadap kemanusiaan, keamanan, dan ekonomi di tingkat negara, regional, dan global. Keanggotaan GHSA melibatkan multisektoral berupa 70 negara dan 6 organisasi, di

dalamnya termasuk WHO dengan tujuan sebagai upaya kolaborasi pemerintah dan organisasi internasional untuk meningkatkan kapasitas negara terkait *International Health Regulation* (IHR) dalam menghadapi kerentanan masyarakat global terhadap perubahan iklim dan pandemi.

Indonesia termasuk salah satu negara yang aktif berpartisipasi menjadi anggota *Global Health Security Agenda* (GHSA) dengan menjadi *Permanent Steering Group Members* periode 2019-2023 bersama 9 anggota lainnya sebagai penggerak dan Ketua Troika GHSA 2016. Pada Pertemuan Tingkat Menteri GHSA ke-5, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan tahunan dan pertemuan tertinggi itu. Pertemuan yang dilaksanakan di Bali itu menjadi momentum penyelesaian pekerjaan rumah untuk mengimplementasikan *International Health Regulation* (IHR) tahun 2015 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam perkembangannya menjadi wadah untuk negara-negara anggota yang memiliki penduduk mayoritas muslim di Asia dan Afrika untuk meningkatkan solidaritas Islam melalui kerjasama di berbagai bidang, seperti politik, ekonom, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di bidang kesehatan ke-4, Indonesia terpilih menjadi Ketua KTM Kesehatan ke-4 tahun 2013 yang diwakili oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp. A, MPH. Pertemuan yang berlangsung tiap dua tahun tersebut membahas mengenai pengendalian Tuberkulosis, Malaria, dan Polio, pencegahan kematian ibu dan anak, serta ketersediaan produk farmasi seperti vaksin. OKI juga turut aktif dalam agenda pembangunan global pasca *Millennium Development Goals* 2014 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2013).

OKI semakin memperkuat kemandirian organisasinya dalam bidang kesehatan melalui KTM ke-45 pada tahun 2018 terkait pengendalian vaksin dan obat-obatan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin baik dengan turut aktif menjadi *Lead Country Coordinator Group* untuk kerjasama obat-obatan, vaksin, dan teknologi medis. Untuk melanjutkan komitmennya, Indonesia

telah menjadi *Center of Excellence* dalam bidang bioteknologi dan vaksin dengan melibatkan Bio Farma sebagai produsen di bidang farmasi.

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara juga perlu meningkatkan pelayanan aktivitas dengan tujuan untuk mengharmonisasikan sektor kesehatan guna mengurangi kesenjangan dan pelayanan kesehatan. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Health Minister's Meeting ke-15 sekaligus didaulat menjadi ketua pada periode 2020-2021. Keketuaan ini menggagas tema "*Advancing the Achievement of ASEAN Health Development*" dengan memiliki dua topik bahasan yaitu pengaturan tentang pengakuan sertifikat vaksin Covid-19 serta membangun ketahanan sistem kesehatan dan percepatan pemulihan Covid-19 di kawasan.

Di samping itu, *Foreign Policy and Global Health* (FPGH) hadir sebagai forum multilateral atas kebutuhan dunia dalam menghadapi masalah kesehatan global yang juga merupakan hasil dari Deklarasi Oslo tahun 2007 yang menjadi langkah pertama sinergi antara politik luar negeri dan kebijakan kesehatan global. Terdapat cita-cita untuk memperkuat komitmen bersama atas isu kesehatan dan meningkatkan kepedulian terhadap ancaman global melalui kacamata politik luar negeri.

FPGH didasarkan pada kesadaran bahwa kesehatan adalah aset fundamental yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Setiap negara harus memastikan warganya agar mendapatkan hak atas hidup sejahtera dan sehat yang telah melewati penelitian, sistem jaminan kesehatan, dan informasi yang aksesibel sebagai tanggung jawab dari keamanan kesehatan global. FPGH dalam pembentukannya memiliki 3 agenda besar, yaitu persiapan kapasitas untuk keamanan kesehatan global, menghadapi ancaman keamanan kesehatan global, dan membuat globalisasi dapat dirasakan seluruh manusia.

Pada tahun 2020, Indonesia terpilih menjadi ketua FPGH dengan membawa gagasan untuk meningkatkan ketangguhan sistem kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan berfokus pada tujuan yang digagas "*Affordable Healthcare*

For All. Masih banyak kasus di dunia yang memperlihatkan kesenjangan akses kesehatan, sehingga masyarakatnya hidup dalam kerentanan dan kerapuhan. Kualitas kesehatan di setiap negara tentunya juga berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perekonomian, demografi penduduk, pendidikan, hingga letak geografis suatu negara.

Keketuaan Indonesia tersebut sebagai salah satu cara agar negara-negara di dunia, khususnya negara anggota FPGH menerapkan sistem kesehatan yang setara bagi warganya untuk menciptakan pertahanan atas keamanan kesehatan nasional maupun global. Alih kuasa jabatan tersebut bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Penularan penyakit yang berasal dari Tiongkok ini membuat tatanan kehidupan masyarakat berubah, di mana akses yang sangat terbatas untuk melakukan perjalanan lintas negara dan membuat perekonomian dunia seakan lumpuh. Di sisi lain, dunia kesehatan terus melakukan inovasi dan kolaborasi untuk dapat menangani pandemi, seperti promosi kesehatan untuk pencegahan penularan penyakit, penyediaan alat kesehatan, obat dan terapi pemulihan, hingga penelitian dan penyediaan vaksin untuk sebagai bentuk strategi ketahanan nasional.

Beberapa hal yang membuat forum ini unggul adalah menjadi forum pertama yang mendeklarasikan isu kesehatan sebagai bagian dari politik luar negeri, meningkatnya pembahasan kesehatan global atas kesadaran bahwa setiap harinya akan berhadapan dengan masalah dan ancaman kesehatan. FPGH juga menjadi forum multilateral diplomasi kesehatan yang menjadi ajang Indonesia untuk turut aktif dalam sektor kesehatan global. Di samping itu, dalam Sidang Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tentang kebijakan luar negeri dan kesehatan global sejak pembentukan FPGH pada tahun 2007. Hal menarik lainnya adalah dengan adanya alih kuasa jabatan kepemimpinan dari Perancis ke Indonesia bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Keadaan tersebut akan memfasilitasi Indonesia dalam upaya diplomasi kesehatan untuk menciptakan keamanan kesehatan dan menanggulangi dampak pandemi.

Penularan penyakit saat ini menjadi fokus dalam agenda keamanan berbagai negara karena dapat dilihat sebagai ancaman keamanan, bukan hanya sekadar isu kesehatan semata. Pandemi yang dapat menular dengan cepat dan menyebabkan jumlah penderita dan kematian yang signifikan akan menimbulkan guncangan ekonomi dan gangguan sosial. Pemerintah dunia saat ini harus menjadi lebih peduli tentang bahaya biologis setelah banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa masalah kesehatan disebabkan oleh wabah penyakit menular. Tindakan politis tersebut dikenal sebagai gagasan yang disebut dengan “*health security*” atau perluasan isu masalah keamanan kesehatan di luar batas wilayah negara.

Menurut WHO, tidak ada negara yang siap dalam menangani pandemi. Adanya kesenjangan dalam kemampuan negara dalam merespon pandemi yang menyebar secara cepat dalam tingkat nasional dan global. Banyaknya kesenjangan yang nampak di permukaan dalam kesiapsiagaan pandemi dan menghambat pelaksanaan *health security* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2020). Di tingkat nasional, kesenjangan terletak pada kapasitas sistem penanganan yang belum kuat, sistem kesehatan yang terbatas, koordinasi antarlembaga yang belum efektif, dan kemampuan komunikasi publik yang belum optimal. Sedangkan pada level global, kesenjangan berada pada kemampuan dalam sistem pencegahan dan penanganan yang terbatas, kapasitas sistem kesehatan dan *supply chain* yang masih lemah, koordinasi kepemimpinan global yang belum optimal, serta kondisi penelitian yang belum kuat.

Menangani permasalahan pandemi Covid-19 merupakan tujuan dari seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun pada implementasinya, pandemi masih sulit diatasi karena terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara, baik dari segi kebijakan, tenaga kesehatan, maupun para ahli di bidang kesehatan. Maka dari itu, diperlukan upaya kerjasama antarnegara untuk menangani permasalahan pandemi ini. Terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas ini membuat Indonesia berinisiasi untuk menggalang tema *Affordable Healthcare for All* dalam keketuaannya di forum Foreign Policy and Global Health sebagai langkah awal dalam menangani pandemi COVID-19 secara global.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, penulis akan menganalisis strategi yang digagas oleh Indonesia sebagai ketua forum inisiatif FPGH tahun 2020 dalam menangani pandemi Covid-19 sebagai implementasi *health security*.

Dampak keketuaan Indonesia pada forum tersebut diharapkan akan membuat Indonesia dapat menjalani tantangan kesehatan global di level multilateral dan menjalankan komitmennya pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang nantinya akan berdampak ke berbagai sektor. Pada sektor ekonomi, hal ini diharapkan sebagai upaya percepatan perbaikan ekonomi dunia yang terdampak besar serta pemulihan ekonomi nasional. Pada sektor sosial-budaya di mana pandemi ini membatasi pergerakan manusia sebagai makhluk sosial, forum ini menjadi salah satu cara agar dapat kembalinya hubungan sosial manusia yang dapat berinteraksi dengan meningkatkan solidaritas masyarakat dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 dan meningkatkan kekuatan kesiapan dunia. Selain itu, pada bidang politik dapat dimanfaatkan oleh para aktor negara sebagai tantangan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 melalui diplomasi kesehatan dengan aktor lainnya.

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan tinjauan literatur untuk memperkuat landasan penulisan dari beberapa karya terdahulu yang berasal dari buku, jurnal, maupun artikel. Peneliti melakukan langkah ini untuk melihat fenomena apa saja yang pernah terjadi dan diulas dalam sebuah karya sebagai referensi demi memperdalam topik penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi pembanding untuk melihat adanya keterbaharuan penelitian.

Stefan Elbe dalam bukunya yang berjudul *Pandemics, Pills, and Politics: Governing Global Health Security* menjelaskan bahwa banyaknya pandemi yang terjadi pada abad ke-21 seperti HIV/Aids, SARS, H5N1, H1N1, Mers, Ebola, dan Zika. Bencana biologis menjadi tantangan pemerintah dalam melindungi warganya dari kecemasan masalah kesehatan abad ini. Selain dari penyakit, ancaman ini juga datang dari tindakan terorisme dikenal dengan *bioterrorism* yang berasal dari peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Fenomena terorisme tersebut dianggap sebagai ancaman biologis karena adanya serangan pelepasan virus, bakteri, atau kuman yang disengaja untuk

menyebabkan penyakit atau kematian yang dapat mengintimidasi masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan, kepercayaan, atau ideologi tertentu. Dalam menangani hal tersebut, muncul istilah baru yang dikenal dengan *health security* atau keamanan kesehatan sebagai upaya untuk melawan ancaman kesehatan dan memperkuat keamanan nasional.

Karya ini secara khusus menjelaskan penanganan pandemi dengan melakukan penelitian terhadap vaksin, antimikroba, terapi, dan diagnosa melalui pendekatan medis (*medical countermeasure*). Penggunaan obat-obatan (*pharmaceuticalization*) dalam mencegah dan menanggulangi pandemi dinilai lebih memiliki peran yang fundamental untuk melawan ancaman biologis. Tamiflu (*oseltamivir*) merupakan merek dagang obat antiviral yang dikembangkan untuk menangani pandemi flu burung. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara global bertransformasi untuk pengembangan tindakan medis terbaru, dalam kasus ini pengembangan keilmuan farmasi dengan proaktif, akuisisi, penyediaan, dan distribusi masal Tamiflu (Elbe 2018).

Buku tersebut memiliki persamaan dengan membahas perkembangan virus influenza yang bermutasi secara global dan menghasilkan berbagai ancaman di dunia. Perbedaan buku tersebut dengan tulisan penulis adalah jenis penyakit yang menyebabkan pandemi yang dibahas secara spesifik, yaitu Covid-19. Adapun pembahasan lainnya yaitu bagaimana dunia menanggulangi hal tersebut melalui tindakan medis dengan menggunakan obat antiviral Tamiflu. Hal ini akan menjadi pembandingan pendekatan kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi.

Terdapat juga penelitian yang bertemakan **Sistem Kesehatan di Negara Maju dan Negara Berkembang** yang ditulis oleh Wahyu Indah Aurora (2019) dan Ririn Noviyanti Putri (2019). Penelitian tersebut memaparkan jaminan kesehatan di berbagai negara dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis penilaian, yaitu pelayanan kesehatan primer, akses kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan komunikasi, serta pencegahan dan promosi kesehatan (Aurora 2019; Putri 2019). Pada negara berkembang, umumnya masalah kesehatan berada pada lambatnya pelayanan

kesehatan primer dan akses yang sulit. Sedangkan permasalahan kesehatan di negara maju di antaranya yaitu lamanya mendapat perjanjian berkunjung, terutama pada waktu setelah bekerja, malam hari, dan akhir pekan. Pembiayaan kesehatan akan berjalan lancar apabila sistem kesehatannya memiliki kualitas yang baik. Terdapat dua jenis pembiayaan kesehatan, yaitu biaya yang dibayarkan sesuai kemampuan dan keadaan pasien (*ability to pay*) dan biaya yang dikenakan secara menyeluruh dan ditetapkan secara merata (*whole coverage*) dan biasanya ditetapkan pada *The Health Insurance Law. Universal Health Coverage* (UHC) menjadi titik awal dalam peningkatan sistem kesehatan. Inisiatif ini akan mencakup wilayah yang luas dan memberikan prioritas layanan kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat kita ketahui bahwa permasalahan kesehatan antara negara maju dan negara berkembang relatif berbeda. Hal ini didasari pada adanya kesenjangan akses kesehatan dan pembiayaan fasilitas. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis seperti pemberian akses kesehatan terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam sistem kesehatan. Namun, terdapat perbedaan pada objek penelitian, yaitu sistem kesehatan nasional di negara berkembang dan negara maju dengan Foreign Policy and Global Health Initiatives.

Penelitian selanjutnya yang berjudul **Pandemi, Kesenjangan, dan Keadilan** (Djoerban dan Harsono 2020) menggambarkan bentuk kesenjangan dan ketidakadilan yang terjadi semasa pandemi Covid-19 berlangsung. Isu disparitas semakin tersorot karena berdampak besar terhadap masyarakat dunia, sehingga setiap orang mengalami kondisi yang berbeda. Wabah ini memperparah kesenjangan karena keterbatasan akses dan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan diiringi dengan kemiskinan dan minat literasi yang rendah seakan menjadi bayangan keterpurukan bangsa dalam menangani situasi saat ini. Kemiskinan menjadi faktor terbesar dalam penularan penyakit karena keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Sikap dan bentuk kepemimpinan pemerintah sangat penting untuk menentukan langkah yang diambil dalam penanggulangan pandemi. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman sangat bergantung pada sikap pemerintahnya. Pentingnya pemerintah pusat untuk

menghormati prinsip budaya dan otoritas daerah dalam setiap kebijakannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan agar tetap mendapatkan haknya dalam akses kesehatan.

Perbedaan karya tersebut dengan tulisan penulis adalah fokus yang dikaji berada pada akses kesehatan yang tersedia. Ia memaparkan bahwa adanya kesenjangan sosial yang semakin meluas akibat pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan. Hal ini yang akan menjadi salah pertimbangan apakah kebijakan yang diterapkan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam upaya perlindungan dan penanggulangan pandemi.

Penelitian selanjutnya terkait pandemi Covid-19 berjudul *Human Security, Social Stigma, and Global Health: The Covid-19 Pandemic in Indonesia* membahas keadaan Indonesia saat dilanda badai Covid-19 yang memunculkan masalah kesehatan dan stigma sosial terhadap masyarakat, khususnya petugas kesehatan yang mengancam keamanan manusia (Dwinantoaji dan DW 2020). Pada era modern ini, manusia menjadi fokus utama dalam keamanan, hak, dan pembangunan global yang dapat disebut dengan konsep *human security*. Tuberculosis (TBC) pada masa krisisnya menimbulkan ketakutan dan diskriminasi terhadap penderitanya yang kesulitan mendapatkan pertolongan dan pengobatan. Terjadinya pandemi Covid-19 saat ini seakan mengulang situasi sebelumnya karena banyak misinformasi yang beredar di masyarakat. Petugas kesehatan mendapatkan stigma negatif karena dinilai menjadi pembawa (*carriers*) virus oleh orang-orang sekitarnya. Di Jakarta, perawat yang menangani langsung pasien Covid-19 banyak yang dikeluarkan dari indekosnya dan tidak dapat tinggal lagi sehingga mereka harus tinggal di rumah sakit karena tidak memiliki tempat lainnya untuk tinggal. Atas terjadinya fenomena tersebut, maka dibutuhkannya kebijakan yang berlandaskan konsep *human security* yang mencakup kehidupan manusia, penghidupan, dan kesejahteraan.

Penulis memiliki ketertarikan pada penelitian tersebut karena menggambarkan kondisi masyarakat saat ini dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi. Dengan

adanya stigma dan diskriminasi, hal tersebut menimbulkan ancaman terhadap human security, khususnya pada bidang kesehatan dan sosial. Penelitian tersebut juga memberikan rekomendasi untuk sikap pemerintah terhadap masalah sosial yang dapat menjadi cerminan terhadap penelitian yang disusun oleh penulis.

Penelitian terkait *Foreign Policy and Global Health* yang ditulis oleh Joevi Roedyati membahas **keketuaan Indonesia pada FPGH tahun 2013** sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku diplomasi dalam menangani masalah kesehatan global. Pada periode tersebut, Indonesia menekankan pentingnya dinamika *global health governance* dalam menangani kasus virus H5N1. Mekanisme yang dijalankan adalah dengan *access and benefit sharing* dengan didasarkan oleh upaya memperjuangkan vaksin yang diproduksi dari sampel virus yang dimiliki oleh Indonesia dapat diterima manfaatnya bagi seluruh pihak, baik negara maju maupun negara berkembang (Roedyati 2013) Indonesia dipandang memiliki potensi yang besar terhadap vaksin dan rekayasa medis, sehingga memiliki kemampuan lebih untuk memimpin sosialisasi isu kesehatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, hal tersebut diadopsi dari resolusi *World Health Assembly (WHA)* mengenai *Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Frameworks: sharing influenza viruses and access to vaccines and other benefits* yang mengikat negara-negara anggota WHO dan pihak swasta dalam menjalankan *global health diplomacy action* dengan prinsip kesetaraan, adil, dan menguntungkan seluruh pihak (Roedyati 2013).

Penulis memiliki keterkaitan terhadap penelitian tersebut karena memiliki kesamaan pada kasus yang sama, yaitu keketuaan Indonesia pada FPGH. Hal yang menjadi pembeda adalah periodisasinya yaitu tahun 2020 serta adanya analisis yang dilihat dari kacamata konsep *global health diplomacy* dan *health security*. Selain itu, penelitian tersebut juga akan memberikan referensi bagaimana Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai Ketua FPGH dalam keadaan dimana dunia sedang terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona atau yang disebut dengan Covid-19. Namun, kekurangan dari penelitian tersebut adalah tidak dijelaskan apa saja bentuk kebijakan, capaian, atau pernyataan lainnya secara lebih dalam. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan sebagai pengisi kekosongan dalam periodisasi yang berbeda dan terbaru.

Atas fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kesehatan global melalui analisis peran Indonesia sebagai ketua *Foreign Policy and Global Health* tahun 2020 dalam menetapkan strategi kebijakan untuk membuat kesehatan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dan menciptakan keamanan kesehatan nasional maupun global dari kerentanan yang ada.

I.2 Rumusan Masalah

Penerapan *health security* di masa pandemi menjadi fokus utama negara-negara di dunia karena ancaman dan krisis kesehatan yang muncul secara bersamaan. Di samping itu, kesenjangan terhadap akses pelayanan dan fasilitas kesehatan berdampak lebih besar bagi masyarakat kelas rendah daripada masyarakat kelas menengah ke atas. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjadikan pokok utama penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut,

“Bagaimana strategi Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui Foreign Policy and Global Health Initiatives Tahun 2020?”

I.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan multilateral yang membuat masyarakat mendapatkan hak yang sama atas akses kesehatan dan kesejahteraan hidup di masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini menjadi gambaran keketuaan Indonesia di FPGH pada periode 2020.

b. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan pendukung atas implementasi konsep *global health security* dan aksi dari *global health diplomacy* dalam menjalankan *Sustainable Development Goals*.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang kesehatan dalam memahami kebijakan penanganan fenomena penyakit menular dengan tingkat penularan berskala global. Selain itu, juga dapat menciptakan sistem kesehatan yang sama bagi seluruh warga dan dapat mempengaruhi aktor lainnya untuk mewujudkan hak kesehatan yang setara.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi kajian ilmiah dalam usaha penanganan pandemi melalui FPGH dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat di masa pandemi Covid-19.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan isi yang terdiri dari lima bab dan selanjutnya terdapat sub-bab penelitian. Sistematika penulisan tersebut berisi:

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan lima sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sub-bab latar belakang menjelaskan terkait masalah yang diangkat penulis, di antaranya yaitu adanya krisis kesehatan akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan penyediaan pelayanan kesehatan berkaitan dengan sistem kesehatan universal, fasilitas, dan sumber daya. Terdapat juga penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan pembandingan dan pembeda dengan penelitian ini. Rumusan masalah berisi masalah penelitian untuk mendapatkan pertanyaan penelitian sebagai fokus yang ingin diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian berkaitan dengan peran penelitian di masa sekarang hingga waktu yang akan berjalan. Sistematika penelitian sebagai gambaran umum isi dan pembahasan penelitian setiap bab skripsi.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan dua sub-bab yang berisikan konsep dan teori penelitian serta kerangka pemikiran dari penulisan karya. Konsep dan teori penelitian merupakan landasan yang menjelaskan temuan dan jawaban dari masalah penelitian. Konsep dan teori yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian, yaitu *global health security* dan kajian *health security* yang menjadi bagian dari studi Hubungan Internasional. Selanjutnya, kerangka pemikiran bertujuan untuk menunjukkan alur pemikiran penelitian dan gambaran umum permasalahan.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari enam sub-bab yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu. Sub-bab objek penelitian ini menguraikan profil dan latar penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu *global health* dan topik penelitian, yaitu *Foreign Policy and Global Health*. Sub-bab teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara dan langkah bagaimana data-data dari permasalahan penelitian dapat terkumpul. Sub-bab sumber data berisikan dari mana data-data penelitian yang kita peroleh, baik dari sumber primer dengan bentuk wawancara maupun sumber sekunder yang berasal dari kajian literatur. Sub-bab teknik analisis data berkaitan dengan cara dan langkah menganalisis dan mengolah data-data yang sudah diperoleh sebelumnya agar dapat dirumuskan temuan penelitian. Sub-bab tabel rencana waktu menjelaskan linimasa waktu penelitian agar dapat selesai tepat waktu dan tetap relevan.

d. BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan dua sub-bab dengan hasil temuan-temuan data penelitian terkait kebijakan yang digagas Indonesia melalui FPGH yang dianalisis berdasarkan konsep *global health diplomacy* dan *health security* untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pada sub-bab pertama akan membahas diplomasi kesehatan yang digagas oleh Indonesia di masa pandemi Covid-19, peran FPGH dalam menangani pandemi Covid-19, dan perumusan

strategi yang digagas oleh FPGH dengan dipimpin oleh Indonesia. Pada sub-bab kedua, penulis akan menganalisis implementasi *health security* dalam setiap kebijakan dan tujuan yang diambil oleh FPGH dalam menangani pandemi Covid-19. Secara khusus juga membahas bagaimana Indonesia sebagai ketua FPGH merumuskan kebijakan dan menjalankan aksinya untuk memberikan pelayanan kesehatan di negara-negara anggotanya semasa pandemi Covid-19.

e. BAB V Penutup

Bab ini berisikan hasil analisis data, kesimpulan, dan keterbatasan dalam penelitian. Selain itu, terdapat juga saran-saran yang di dalamnya terdapat pendapat penulis untuk masalah yang diangkat serta pemecahan masalah untuk ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.